

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 3 Januari 2024
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Revisi UU Desa Dana Desa dan

RENCANA usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah dirumuskan oleh Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang Desa di Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Pleno (3/7/2023). Hasil rumusan tersebut tidak hanya menyepakati adanya perubahan atau revisi UU Desa, tetapi juga menyepakati usulan untuk menaikkan besaran alokasi dana desa yang diterimakan ke desa, yaitu naik 20 persen.

Banyak pendapat terkait usulan perubahan UU Desa ini mengandung makna politis, di samping makna yang memang dibutuhkan masyarakat. Hal ini diperkuat karena usulan ini berbarengan dengan dinamika tahapan Pemilu 2024 dan diusung aspirasi dari kepala desa yang merupakan kekuatan dalam keberhasilan perolehan suara di daerah pemilihan partai politik.

Terlepas dari kepentingan politik, persoalan yang mendesak dan mendasar dalam implementasi UU Desa sebenarnya tidak sepenuhnya diselesaikan dengan revisi atau adanya usulan perubahan UU Desa dan penambahan besaran alokasi dana desa. Fenomena yang terjadi pada bulan Januari 2022 bahwa masih banyak ditemukan desa-desa yang dalam statusnya berkembang, belum maju, masih ada yang tertinggal dan miskin. Mengingat UU Desa yang telah dilaksanakan hampir sembilan tahun ini menemui beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa dan manfaat dana desa dalam mewujudkan kemandirian desa maupun kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk itu yang harus dipikirkan seluruh *stakeholders* infrastruktur politik maupun suprastruktur politik, semestinya yang lebih mendesak adalah demi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, yaitu lebih menumbuhkan *public value* (nilai publik) dalam pengelolaan dana desa dalam mendukung penuh kesejahteraan masyarakat desa dan terca-

Oleh Suharto



Mengapa desa mandiri itu menjadi penting dalam UU Desa? Bahwa level terakhir sebagai ujung tombak dari otonomi daerah itu adalah desa. Keunikan potensi desa sebagai modal bagi keberhasilan pembangunan menjadi prioritas pembangunan. Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana desa serta kapasitas pemerintahan desa dan kelembagaan desa harus sejalan dengan kemajuan era yang dihadapi.

Keterpaduan

Untuk mewujudkan desa mandiri, diperlukan harmonisasi atau keselarasan dan keterpaduan seluruh *stakeholders* dalam membangun desa dengan segala dinamikanya. Dengan demikian akan bisa terjaminnya kemajuan desa bagi

painya desa mandiri sesuai amanah dalam UU Desa. Hal ini diperlukan strategi pengembangan khusus dalam pengelolaan dana desa dengan pola pemberdayaan masyarakat berbasis *value* di masyarakat setempat. Nilai publik dapat dinyatakan sebagai nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat atau warga negara secara kolektif yang tidak hanya bisa diciptakan oleh pemerintah atau organisasi publik, namun juga organisasi swasta. (Moore, 1995-Gabriel Lele, 2013).

Beberapa contoh nilai publik yang seharusnya dihasilkan oleh organisasi sektor publik dalam pengelolaan dana desa, antara lain: masyarakat sejahtera yang bebas dari kemiskinan, mencapai optimal desa mandiri dengan indeks sosial, ekonomi dan lingkungan infrastruktur secara maksimal. Pemerintahan desa yang bebas dari korupsi. Menjaga hak-hak azasi dan martabat manusia; menginspirasi masyarakat untuk memiliki budaya yang tinggi; partisipasi, gotong royong, kepedulian (modal sosial). Peningkatan kesadaran masyarakat atas budaya disiplin, integritas, tertib lalu lintas, dan lainnya.

Disamping hal tersebut, yang mendesak perlu diperhatikan adalah dampak terhadap masyarakat sasaran. Pada akhir-akhir ini masyarakat sasaran masih kurang diposisikan sebagai subjek atau pelaku. Dalam pelaksanaannya sering kali masyarakat sasaran diposisikan sebagai penerima pasif bantuan dan tidak dianggap sebagai pelaku aktif dalam program pembangunan. Maka harusnya menjadi mendesak dikembalikan pada masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dana desa. Dengan hal ini sebenarnya mendorong percepatan terbentuknya nilai publik yang sangat berhasil dalam mendukung keterlibatan dan kepemilikan masyarakat atas proyek-proyek pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan serta mewujudkan desa mandiri.